

**MONOPOLI HARGA DALAM JUAL BELI BUAH
PINANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH
(Studi Kasus di Desa Tanjung Belit, Kec. Siak Kecil,
Kab. Bengkalis)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum**



Oleh:

WALDY RAMEISA PUTRA
10822003560

Program S1

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2013 M/ 1434 H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah , puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammada SAW, keluarga, sahabat dan umat Islam seluruhnya. Sadar sepenuhnya akan kemampuan dan keterbatasan penulis, penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Rahman) dan Ibunda tercinta (Ety Ernawati) terimakasih do'a dan segala jerih payah ayahanda dan ibunda dalam memberikan materi, semangat dan dorongan, serta adinda-adindaku Mohd. Riady Fitra, Rizky Mailani Rahman, dan Nurhaliza Rahman terima kasih atas semua dorongan, pengorbanan, pengertian, serta do'a restu sehingga tercapainya cita-cita penulis.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.
3. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum DR. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd beserta stafnya, Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bermacam-macam disiplin ilmu kepada penulis.
4. Yang terhormat Ketua Jurusan Muamalah Bapak Kamiruddin, M.Ag beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Yang terhormat Bapak DR. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku pembimbing saya dalam menyusun skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis guna kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh perangkat Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan dukungan dalam melakukan penelitian.
7. Terimakasih buat sahabat-sahabat angkatan 2008 jurusan Muamalah UIN SUSKA RIAU yang tidak bias disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan dukukangan dan masukannya dalam pembuatan skripsi ini.
8. Dan juga ucapan terima kasih kepada Zulkhoiri Efendi, Isral Muslim, Surya Andika, Rian Fahdillah dan Miki Rikardo sebagai teman kos yang banyak memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Kemudian khususnya kepada Sri Rahayu yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah disebutkan nama di atas, semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda serta amal perbuatannya diterima Allah SWT. Amin...

Pekanbaru, 13 November, 2012

Penulis

Waldy Rameisa Putra

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **MONOPOLI HARGA DALAM JUAL BELI BUAH PINANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH***. Yang dimaksud judul di atas adalah praktek monopoli yang terjadi di dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, kemudian dikaji menurut *fiqh muamalah*.

Latar belakang permasalahan ini adalah dimana di Desa Tanjung Belit sebagian masyarakatnya bertani buah pinang. Masyarakat menjual hasil buah pinangnya kepada toke yang ada di desa tersebut. Di desa tersebut hanya ada satu toke, yang mengakibatkan toke tersebut melakukan penetapan harga semena-menanya. Ditambah lagi dengan keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Kemudian toke juga melakukan pemotongan timbangan setiap kali masyarakat atau penjual melakukan penimbangan dengan alasan tertentu. Di sinilah toke melakukan manipulasi terhadap harga buah pinang. Dan timbullah praktek monopoli dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit.

Melihat dari fenomena tersebut, maka ada beberapa permasalahan yang timbul dan perlu adanya penyelesaian dalam bentuk penelitian untuk mengetahui bagaimana monopoli harga dalam jual beli dalam jual beli buah pinang di desa Tanjung Belit, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit, serta untuk mengetahui tinjauan *fiqh mu'amalah* dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis tersebut.

Penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), yaitu dengan cara turun ke lapangan langsung/lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pembahasan Deduktif, Induktif, dan Deskriptif terhadap data primer dan sekunder. Data primer dalam penyusunan ini adalah data yang diperoleh berupa, wawancara dan angket, sedangkan data sekunder adalah data sekunder adalah data pendukung yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan bahwa menurut *fikih muamalah* transaksi jual beli buah pinang di desa Tanjung Belit masih banyak menyimpang dari ketentuan syari'at Islam. Dan dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya praktek monopoli harga dalam transaksi jual beli buah pinang.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli adalah keterbatasan informasi masyarakat yang disebabkan lokasi desa yang terisolir dan jauh dari pusat kota.
3. Jelas Islam melarang dengan adanya praktek monopoli harga yang terjadi dalam transaksi jual beli buah pinang. Karena monopoli adalah sesuatu kezhaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah , puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammada SAW, keluarga, sahabat dan umat Islam seluruhnya. Sadar sepenuhnya akan kemampuan dan keterbatasan penulis, penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Rahman) dan Ibunda tercinta (Ety Ernawati) terimakasih do,a dan segala jerih payah ayahanda dan ibunda dalam memberikan materi, semangat dan dorongan, serta adinda-adindaku Mohd. Riady Fitra, Rizky Mailani Rahman, dan Nurhaliza Rahman terima kasih atas semua dorongan, pengorbanan, pengertian, serta do'a restu sehingga tercapainya cita-cita penulis.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.
3. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum DR. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd beserta stafnya, Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bermacam-macam disiplin ilmu kepada penulis.
4. Yang terhormat Ketua Jurusan Muamalah Bapak Kamiruddin, M.Ag beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Yang terhormat Bapak DR. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku pembimbing saya dalam menyusun skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis guna kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh perangkat Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan dukungan dalam melakukan penelitian.
7. Terimakasih buat sahabat-sahabat angkatan 2008 jurusan Muamalah UIN SUSKA RIAU yang tidak bias disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan dukukangan dan masukannya dalam pembuatan skripsi ini.
8. Dan juga ucapan terima kasih kepada Zulkhoiri Efendi, Isral Muslim, Surya Andika, Rian Fahdillah dan Miki Rikardo sebagai teman kos yang banyak memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Kemudian khususnya kepada Sri Rahayu yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah disebutkan nama di atas, semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda serta amal perbuatannya diterima Allah SWT. Amin...

Pekanbaru, 14 November, 2012

Penulis

Waldy Rameisa Putra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografi dan Demografi.....	12
B. Sosial Budaya	13
C. Agama.....	15
D. Sosial Ekonomi.....	16
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MONOPOLI	
A. Pengertian Monopoli	19
B. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	20
C. Monopoli Menurut Islam.....	25
BAB IV MONOPOLI HARGA BUAH PINANG DI DESA TANJUNGBELIT KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS	
A. Monopoli Harga dalam Jual Beli Buah Pinang di Desa Tanjung Belit	37
B. Faktor-Faktor terjadinya Monopoli di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.	41

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Monopoli Harga Dalam Jual Beli Buah Pinang.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Penduduk Desa Tanjung Belit Menurut Jenis Kelamin	13
Tabel II	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	15
Tabel III	Daftar Sarana Peribadatan di Desa Tanjung BelitKecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis	16
Tabel IV	Daftar Mata Pencarian masyarakat Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.....	18
Tabel V	Daftar Jenis Kelamin Responden di Desa Tanjung Belit	41
Tabel VI	Tanggapan Responden Mengenai Jual Beli Termasuk Kegiatan Muamalah	43
Tabel VII	Tanggapan Responden Tentang Sering/Tidak Melakukan Jual Beli.....	41
Tabel VIII	Tanggapan Responden Mengenai Monopoli Harga atau Kekuasaan dalam Menetapkan Harga	41
Tabel IX	Tanggapan Responden Mengenai Potongan Timbangan	43
Tabel X	Sikap Responden Jika Toke Mengurangi Timbangan Buah Pinang	44
Tabel XI	Tanggapan Responden Mengenai Sesuai/Tidak Jual Beli Buah Pinang yang Dilaksanakan Sesuai Syari'at Islam.....	45
Tabel XII	Tanggapan Responden tentang Terpaksa/Tidak Ukuran Timbangan Dipotong.....	46
Tabel XIII	Tanggapan Responden Tentang Informasi Harga Buah Pinang.....	47
Tabel XIV	Tanggapan Responden Tentang Sesuai/Belum Harga Buah Pinang dengan Harga Pasaran.....	48
Tabel XV	Tanggapan Responden Tentang Turun Naiknya Harga Buah Pinang di Pasaran.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, ajarannya mencakup semua persoalan baik yang menyangkut ibadah maupun mu'amalah. Mu'amalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam setiap manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja keras dengan keringat sendiri, sebaliknya Islam sangat melarang manusia untuk bermalas-malasan.

Allah menciptakan manusia dengan sifat yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain yang disebut dengan makhluk sosial. Tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya dan dia mesti memenuhi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi kepada kita untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan sehingga hidup manusia menjadi lebih baik dan mekanisme ini berjalan lebih baik.

Salah satu bentuk usaha yang ditawarkan oleh Islam adalah jual beli. Dalam terminologi Islam jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya.¹ Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu

¹HendiSuhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), Cet. Ke-1, h.67

dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut *syara'* adalah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta lain dengan *ijabdan qabul*.² Dalam agama Islam ketentuan-ketentuan itu telah diatur dengan baik dan termasuk salah satu peluang usaha yang boleh dilakukan oleh agama sesuai dengan firman Allah S.W.T:



Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba”
(QS. al-Baqarah; [2] : 275).³

Islam mengharamkan seluruh jenis penipuan baik dalam masalah jual beli maupun segala macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam segala urusannya sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada usaha duniawi. Adapun jenis penipuan yang dimaksud dalam jual beli tersebut adalah mengurangi takaran timbangan tersebut.⁴ Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu dari berbagai mu'amalah dan dijadikan sebagai salah satu wasiatnya di akhir surat al-An'am:



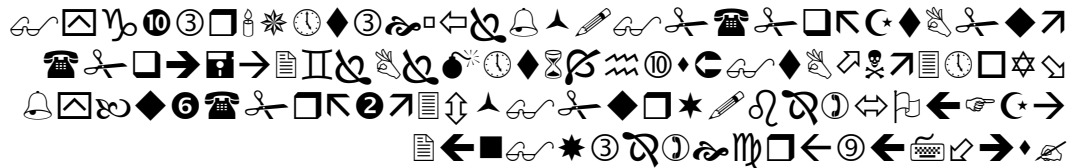
²A.Zainudin, dkk, *Al-Islam 2 Mu'amalah dan Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet ke -2, h.11

³Depag RI, *Terjemahan al-Qur'an al-karim*, (Jakarta: Tt,2000) Cet ke-11, h.26

⁴Syekh Yusuf Qardawi, *Terjemahan Halal dan Haram*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), edisi revisi, h. 351

Artinya : *“Penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur karena kami tidak memberi beban kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya”*.(QS. al-An’am: 152).

Didalam surat yang lain juga dijelaskan:



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah”* (QS. al-Baqarah: 172).

Jual beli terlarang karena kerugian yang disebabkan penipuan seperti penipuan yang terjadi pada suatu barang karena ketidaktahuan barang yang diakadkan, karena ketidaktahuan mengenai harga barang yang dihargai.⁵ Transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip kereleaan antara kedua belah pihak (ridha sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dizalimi maupun menzalimi.

Islam juga mengharamkan praktek monopoli ataupun disebut dengan *ikhtikar*, sedangkan monopoli itu adalah menahan barang dari perputaran dipasar sehingga harganya naik. Ada beberapa pendapat ulama tentang *ikhtikar*. Diantaranya adalah:

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih bahasa oleh: Abu Usamah Fakhtur Rahman, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), Jilid 2, Cet. ke-2, h. 294

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi adalah pengharaman iktikar tidak terbatas pada barang kebutuhan pokok saja, melainkan barang yang dibutuhkan manusia, baik makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah.

Syaikh Sayyid Sabiq *rahimahullah* juga memberikan kriteria yang sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *fihi sunnah*, para ahli fiqh berpendapat bahwa penimbunan barang diharamkan (terlarang) setelah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Barang yang ditimbun lebih dari apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan setahun penuh. Karena seseorang hanya dibolehkan menyimpan atau menimbun persediaan nafkah pangan untuk diri sendiri dan keluarganya selama satu tahun, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.
2. Pemilik tersebut menanti kenaikan harga barang agar pada saat menjualnya ia mendapatkan harga yang lebih tinggi.
3. Penimbunan dilakukan pada saat masyarakat sangat membutuhkan barang-barang tersebut seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Apabila barang-barang tersebut berada di tangan para pedagang dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan barang karena tidak menimbulkan kesulitan publik.⁶

⁶ Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan Nor Hasanuddin, (Lebak Bulus: Pena Pundi Aksara: 2006), Cet. Ke-1, h.156

Namun monopoli di sini adalah toke yang berada di Desa Tanjung Belit semena-mena terhadap harga dalam praktek jual beli buah pinang di desa tersebut.

Praktek monopoli harga buah pinang penulis temukan di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang mana dalam harga penjualan buah pinang tersebut ditentukan oleh toke atau pembeli. Kalau dilihat pada jual beli yang lain, yang menentukan harga adalah seorang penjual. Karena yang menentukan harga pada jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah toke. Dan toke yang ada di desa tersebut hanya satu-satunya. Sehingga toke tersebut semena-mena dalam menentukan harga buah pinang. Dan mengakibatkan terjadinya *manipulasi* harga yang tidak ada transparansi harga buah pinang kepada penjual.

Di samping itu pembeli atau toke melakukan potongan persen. Potongan persen yang dimaksud adalah saat penimbangan terjadi toke melakukan pemotongan terhadap berat buah pinang yang di timbang. Dengan alasan buahpinang sangat sensitif terhadap suhu. Potongan persen terhadap pinang dilakukan terhadap buah pinang yang sudah kering ataupun basah (belum kering). Buah pinang tersebut dibeli dengan harga yang murah setelah itu di jual dengan harga yang tinggi. Setelah pinang didapat kemudian dikumpulkan di gudang buah pinang milik toke tersebut. Penimbunan dilakukan dengan maksud menunggu harga pinang di pasaran naik. Sehingga toke tersebut mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dan penulis

temukan masyarakat merasa dirugikan terhadap praktek monopoli tersebut. Mereka terpaksa menjual buah pinang kepada toke tersebut karena toke di desa itu hanya satu-satunya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan tokoh masyarakat yang penulis temui.

Menurut Rahwanto, salah satu tokoh masyarakat Desa Tanjung belit, masyarakat sangat dirugikan dengan adanya praktek monopoli terhadap harga buah pinang yang dilakukan oleh toke atau pembeli buah pinang. Padahal masyarakat berharap banyak terhadap penjualan dari buah pinang. Walaupun tidak banyak yang dihasilkan. Dari penjualan itulah masyarakat desa Tanjung Belit bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun tidak seutuhnya. Namun masyarakat tidak bisa berbuat banyak dengan adanya praktek monopoli tersebut.⁷

Setelah memperhatikan kasus-kasus di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji monopoli harga tersebut serta membahasnya ke dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Monopoli Harga dalam Jual Beli Buah Pinang menurut Perspektif Fiqh Mu’amalah (Studi di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis)”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini maka, peneliti lebih memfokuskan kepada monopoli buah pinang (Studi Kasus di Desa

⁷ Rahwanto (Guru Sekolah Dasar Desa Tanjung Belit), *wawancara*, Tanjung Belit, 15 Februari 2012

Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis) dan pandangan masyarakat Desa Tanjung Belit terhadap monopoli harga dalam jual beli buah pinang.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari batasan masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan praktek monopoli harga buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap permasalahan monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya praktek monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

- c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap permasalahan monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mendapat gelar Sarjana Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- b. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam kancah pemikiran hukum Islam dalam bidang Fiqh Muamalah.
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis tentang kasus monopoli harga dalam jual beli buah pinang dan mencari solusi yang terbaik.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah toke (pembeli), penjual dan seluruh masyarakat Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

b. Objek Penelitian

Sedang objek penelitian ini adalah praktek monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Bengkalis.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yaitu (petani).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan pihak yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu mengamati secara langsung. Jadi data yang diperoleh oleh penulis dari Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.
- b. Studi kepustakaan, penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti dan informasi-informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan penelitian penulis.
- c. Wawancara, mengadakan wawancara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait.
- d. Angket, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada pihak terkait secara tertulis.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dengan jumlah 1565 orang termasuk 80 orang pemilik pinang, 15 orang tokoh masyarakat dan 1 orang toke. Dari pemilik buah pinang diambil sampel 80 orang (100%) dalam pengambilan sampel ini peneliti menggunakan *Purposite Sampling*.

6. Metode Analisis Data

- a. *Deskriptif* yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data-data yang diperoleh kemudian dianalisis.
- b. *Deduktif* yaitu mencari data yang umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.
- c. *Induktif* yaitu mencari data yang khusus untuk mencari kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Identifikasi lokasi penelitian yang terdiri dari: geografis dan demografi, sosial budaya, agama dan sosial ekonomi.
- BAB III : Tinjauan Teoritis, Tinjauan umum tentang monopoli: Pengertian dan monopoli menurut Islam, dan dasar hukum monopoli.
- BAB IV : Monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari: monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa

Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, faktor-faktor terjadinya monopoli harga di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, dan tinjauan fiqh mu'amalah terhadap monopoli harga dalam jual beli buah pinang tersebut.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demografi

1. Geografi

Berdasarkan pengamatan yang penulis lihat di tempat penelitian Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil

Kabupaten Bengkalis yang mana desa tersebut berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat, desa tersebut berbatasan dengan Desa Sadar Jaya.
- b. Sebelah Timur, desa tersebut berbatasan dengan desa Lubuk Muda.
- c. Sebelah Selatan, desa tersebut berbatasan dengan desa Lubuk Garam.
- d. Dan sebelah Utara, desa tersebut berbatasan dengan Desa Dompas.¹

2. Demografi

Sesuai dengan data yang² penulis dapatkan, bahwa jumlah warga yang tinggal di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sebanyak 1565 jiwa dari 754 KK.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut jumlah penduduk Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis menurut jenis kelamin.

¹Arsip Desa Tanjung Belit, Tahun 2012

²Arsip Desa Tanjung Belit, Tahun 2012

TABEL I
Jumlah penduduk Desa Tanjung Belit menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	756
2	Perempuan	809
Jumlah		1.565

Hasil Data: Kantor Desa Tanjung Belit Tahun 2012

B. Sosial Budaya

Budaya yang berkembang pada masyarakat Desa Tanjung Belit adalah budaya masyarakat majemuk yang tertib sosialnya berbeda. Komunitas dan kelompok-kelompok yang secara latar belakang cultural mereka adalah sama karena masyarakat Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah berbudaya Jawa, walaupun dari mereka ada pendatang.

Kebanyakan dari mereka berasal dari Pulau Jawa. Dan menetap di desa tersebut. Dan ada juga yang berasal dari Bangkinang, Padang dan Rupa. Mereka yang datang pada awalnya adalah mereka yang menikah dengan warga desa Tanjung Belit dan akhirnya menetap.³

Walaupun beragama yang latar belakang masyarakatnya berbeda suku dan budaya namun masih ada kesamaan ciri

³Joko, (Kepala Desa Tanjung Belit), wawancara, Tanjung Belit, 05 Maret 2012.

kehidupan masyarakat tersebut dalam suatu budaya. Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah masih tergolong daerah pedesaan yang masih kekurangan fasilitas baik transportasi maupun informasi. Sedangkan letak Kantor Camat Siak Kecil dan Polsek Siak Kecil berada 7 Km dari Desa Tanjung Belit.

Dengan demikian, budaya yang sering nampak adalah budaya Jawa dikarenakan mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat Jawa walaupun pada awalnya sekali mereka adalah pendatang.

Meskipun mereka berlatar belakang budaya yang berbeda mereka saling menghargai antara masyarakat pendatang dan penduduk asli. Menurut Ali (Pengurus Mesjid Istiqomah Desa Tanjung Belit) masyarakat Desa Tanjung Belit mayoritas beragama Islam. Dan minoritas beragama Budha dan Kristen.⁴

Masyarakat Desa Tanjung Belit Kecamatan Kabupaten Bengkalis kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani baik itu petani sawit, karet dan pinang. Walaupun yang pada intinya mereka bertani sawit dan karet. Sedangkan pinang hanyalah mata pencaharian sampingan saja. Di desa tersebut terdapat dua Sekolah Dasar (SD), satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan satu Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Meskipun mereka adalah masyarakat yang tinggal di desa mereka tidak luput dengan agama seperti halnya: mendidik anak-

⁴ Ali, (Kepala Dusun Rantau Panjang), wawancara, Tanjung Belit, 06 Maret 2012

anak mereka dan mengaji, menyekolahkan anak-anak mereka ke Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

C. Agama

Berdasarkan keterangan Rahmadi (Tokoh Agama dan pengurus mesjid Al-Istiqomah Desa Tanjung Belit) di mana mayoritas dari masyarakat desa Tanjung Belit adalah beragama Islam karena di desa ini kerabatannya masih sangat dekat sehingga warga yang satu dengan yang lainnya masih adaikatankeluarga.

TABEL II

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1540 orang	98,4%
2	Budha	25 orang	1,59%
	JUMLAH	1565 orang	100%

Hasil Data: Kantor Desa Tanjung Belit Tahun 2012

Namun pemahaman tentang agama Islam mereka masih kurang dan realisasinya nampak dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan siraman-siraman keagamaan masih kurang dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan beragama sehingga pengamalan tentang Islam

masih kurang. Walaupun bangunan peribadatan dan surau dibangun namun masyarakat tidak meramaikannya.

TABEL III

**Daftar Saran Peribadatan di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil
Kabupaten Bengkalis**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	5 buah
2	Surau/Langgar	4 buah
3	Gereja	-
4	Vihara/Klenteng	1 buah
Jumlah		10 buah

Hasil Data: Kantor Desa Tanjung Belit Tahun 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis terdapat 2 Buah Mesjid dan 4 buah surau. Mesjid dan mushalla digunakan sebagai tempat bermacam-macam kegiatan keagamaan seperti: wirid, pengajian, shalat berjamaah dan kegiatan anak-anak mengadakan lain-lain. Selain diadakan

di mejid, wiridjugadiadakandarirumahkerumah. Wirid di adakansetiapharikamis (kamismalam).⁵

D. SosialEkonomi

BerdasarkanwawancaradengankepalaDusun III (TanjungAsli) diketahuibahwatingkatperekonomianmasyarakatDesaTanjungBelitKecamatanSiak Kecil KabupatenBengkalistergolongpadamasyarakatekonomimenengahkeawah.

Hal ini dapat dilihat karenasehari-hari mereka berkebun untuk menyadap karet. Selain menyadap karet ada juga masyarakat yang bermatapencaharian sebagai PNS seperti menjadi guru atau pun bekerja di kantor desa maupun kecamatan. Namun mereka yang bekerja sebagai PNS tidaklah banyak. Dan ada juga yang berkebun sawit dan diselingi berkebun pinang di kebun maupun perkarangan rumah mereka. Itu semua mereka lakukan agar dapat membantu perekonomian keluarga mereka.

Kalau dilihat dari alat transportasi, alat transportasi menuju desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis menggunakan sepeda motor. Angkutan umum di desa tersebut belum tersedia. Namun mereka patut bersenang hati karena desa Tanjung Belit baru saja mendapat penerangan atau sudah merasakan listrik dari pembangkit listrik Negara

⁵Hendra, (Tokoh Agama), *wawancara*, Tanjung Belit, 07 Maret 2012

(PLN). Walaupun belum sepenuhnya tercapai. Karena sebagian dari masyarakat belum mampu untuk membayar administrasi yang mahal.

Dengan kondisi lingkungan yang terletak di pedesaan yang jauh dari kabupaten dan kecamatan juga letak lingkungannya merupakan hutandan jauh dari laut maka tidak ada mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan apalagi jarak yang jauh dari ibukota kecamatan Siak Kecil yang berjarak sekitar 7 km dengan jalan yang rusak.

Koperasi yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam masalah ekonomi tidak ada apalagi mendapatkan modal untuk berdagang juga tidak ada.

TABEL IV

Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	575 orang
2	Industri	5 orang
3	Perdagangan dan Akomodasi	16 orang
4	Pegawai Negeri Sipil	20 orang
5	TNI/Polri	1 orang
6	Pegawai Honorer	40 orang
7	Mengurus Rumah Tangga	420 orang

8	Pengangguran	488 orang
Jumlah		1565 orang

Hasil Data: Kantor Kepala Desa Tanjung Belit 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat desa Tanjung Belit bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 575 orang, yang bekerja di industri berjumlah 5 orang, perdagangan dan komodasi 16 orang, sebagai pegawai negeri sipil berjumlah 20 orang, sebagai angkatan berjumlah 1 orang, pegawai honorer berjumlah 40 orang, yang mengurus rumah tangga berjumlah 420 orang dan pengangguran berjumlah 488 orang.

Jumlah masyarakat yang bekerja di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis berjumlah sebanyak 657 orang, hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk dengan jumlah 1565 orang atau jiwa.

BAB III

LANDASAN TEORI

TINJAUAN UMUM TENTANG MONOPOLI

A. Pengertian Monopoli menurut Undang-undang

Istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani (*Greek word*) *monospolein*, yang berarti menjual output di pasar sendirian (*alone to sell*). Para ahli ekonomi menyebut istilah itu dengan nama monopoli, yaitu terjadi bila output suatu industri dihasilkan dan dijual oleh perusahaan tunggal (*a single firm*). Perusahaan yang menjual output tersebut disebut sebagai monopolis, atau perusahaan monopolis (*monopoly firm*).¹

Dalam Kamus Ilmiah Populer Kontemporer istilah monopoli diartikan dengan situasi pasar dimana seorang atau suatu kelompok mempunyai pengaruh demikian besar atas penawaran artikel tertentu, hingga ia atau mereka dapat menentukan harga.² Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.³

¹Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. ke-1, h. 66 - 67.

²Alex, MA, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), Cet. ke-1, h. 415

³Lihat : UU RI No. Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1.

B. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sebagai langkah yang paling jelas dalam penataan persaingan usaha di Indonesia, agar tidak terjadi penguasaan Industri oleh kelompok pelaku bisnistertentu, dan agar terjadi iklim yang kondusif dalam dunia usaha serta memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil, agar terjadi efisiensi dalam perekonomian nasional maka diundangkanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata.

Ada beberapa ketentuan mengenai larangan terhadap beberapa hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, ialah mengenai hal-hal sebagai berikut:⁴

- a. Larangan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Larangan-larangan tersebut adalah :

1. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan atau berakibat penguasaan produksi dan atau persamaan barang atau jasa (pasal 4 ayat 1);
2. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen (pasal 5 ayat 1);

⁴Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Membuat perjanjian dengan pembeli yang mengakibatkan terjadinya perbedaan (diskriminasi) harga barang atau jasa yang harus dibeli oleh pembeli yang satu dengan pembeli yang lain (pasal 6).
4. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar (pasal 7).
5. Membuat perjanjian yang melarang pembeli barang atau jasa untuk menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang dibelinya itu dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang ditetapkan dalam perjanjian (pasal 8);
6. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran diantara mereka, dimana pelaku usaha yang satu hanya akan melakukan pemasaran diwilayah pemasarannya sendiri sebagaimana yang telah disepakati dan tidak melakukan pemasaran di wilayah pemasaran mitra janjinya (pasal 9);
7. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan melakukan pemboikotan terhadap para pelaku usaha pesaing mereka yang bertujuan :
 - a. Menghalangi pelaku usaha lain untuk dapat melakukan usaha yang sama (pasal 10 ayat 1);
 - b. Menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain (pasal 10 ayat 2 huruf a), dan membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau

membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan (pasal 10 ayat 2 huruf b).

8. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan terbentuknya suatu kartel diantara mereka (pasal 11);
9. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk suatu trust diantara mereka (pasal 12);
10. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk terciptanya oligopsoni (pasal 13);
11. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk terjadinya integrasi vertikal diantara mereka (pasal 14);
12. Membuat perjanjian yang mempersyaratkan agar pelaku usaha yang lain hanya memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa yang telah dibelinya kepada pihak tertentu atau ditempat tertentu (pasal 15 ayat 1);
13. Membuat perjanjian dengan pihak lain yang mempersyaratkan bahwa pihak lain hanya dapat membeli apabila yang bersangkutan membeli pula barang atau jasa yang lain dari yang bersangkutan (pasal 15 ayat 2);
14. Membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga atas barang atau jasa yang mensyaratkan bahwa pihak yang lain akan diberi harga yang dimaksud atau akan diberi potongan atas harga tersebut apabila yang bersangkutan :
 - a. Bersedia pula membeli barang atau jasa yang lain (pasal 15 ayat

3 huruf b);

b. Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama dari pelaku usaha pesaingnya (pasal 15 ayat 3 huruf a).

15. Membuat perjanjian dengan pihak diluar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 16);

c. Larangan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan-kegiatan yang dilarang itu adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa (pasal 17 ayat 1);
- b. Menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan (pasal 18 ayat 1)
- c. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasar yang bersangkutan (pasal 19 huruf a);
- d. Menghalangi konsumen atau pelanggan dari pelaku usaha pesaingnya untuk dapat melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya (pasal 19 huruf c).
- e. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dalam pasar yang bersangkutan (pasal 19 huruf c);
- f. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (pasal 19 huruf d);

- g. Melakukan penjualan secara rugi atau dengan harga yang sangat rendah yang bertujuan untuk mematikan usaha pesaingnya dipasar yang bersangkutan (pasal 20);
- h. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan jasa (pasal 21);
- i. Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender (pasal 22);
- j. Melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha yang merupakan rahasia perusahaan pesaingnya (pasal 23), dan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya (pasal 24).
- k. Menyalahgunakan posisi dominan untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen dalam memperoleh barang atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas (pasal 25 ayat 1 huruf a)
- l. Menyalahgunakan posisi dominan untuk membantu pasar dan pengembangan teknologi serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.
- m. Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha pada bidang dan pasar yang sama, atau

mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, bila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- Satu pelaku usaha atau satu kelompok satu usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu (pasal 27 huruf a).
- Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (pasal 27 huruf b);
- a. Melakukan pengabungan dan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 28 ayat 1);
- b. Melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain, apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 28 ayat 2).

C. Monopoli Menurut Islam

Dalam mempertahankan hidup manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang ada, selama tidak berbenturan dengan kepentingan orang lain. Sebab jika manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya maka akan terjadi konflik.⁵

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2000), Cet. 1, h. 1

Dalam aturan-aturan syari'at Islam-pun menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT. Demikian pula dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, nilai-nilai Islam senantiasa menjadi landasan utamanya. Siapa saja yang ingin bermuamalah dibolehkan kecuali yang dilarang. Hal ini memberikan ruang dan gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.⁶

Meskipun Islam memberikan kesempatan yang luas bagi kaum muslimin untuk menjalankan aktivitas ekonominya, namun Islam menekankan adanya sikap jujur, yang dengan kejujuran itu diharapkan dapat dijalkannya sistem ekonomi yang baik. Sebab Islam sangat menentang adanya sikap kecurangan, penipuan, praktek pemerasan, pemaksaan dan semua bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain.⁷ Apalagi, saat ini kehidupan manusia semakin lama dihadapkan kepada situasi yang sulit, dimana munculnya kelangkaan (*scarcity*) sumber daya yang semakin terbatas. Di sisi lain hasrat dan kebutuhan manusia untuk mencari kepuasan pribadinya semakin banyak dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman.⁸

Dengan situasi ini pihak yang lemah hanya mampu untuk mempertahankan hidupnya agar tetap survive. Sangat berat bagi mereka

⁶Imam Subhan, *Siasat Gerakan Kota dan Jalan Untuk Masyarakat Baru*, (Yogyakarta: Labda, 2003), Cet. ke-1, h. 29

⁷ Khuzaimah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), Cet. ke-1, h. 92.

⁸Sri Adiningsih, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPEF, 1999), Cet. ke-1, h. 1.

untuk meningkatkan income dan taraf hidup. Sementara di sisi lain pihak yang memiliki peran ekonomi kuat dengan pola perilaku aneh dan ekstrim yang tidak pernah diikuti dengan nilai-nilai ketuhanan tidak merasa puas menambah dan menumpuk harta dan kekayaan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Ini disebabkan karena orientasi ekonominya sudah melenceng dimana ekonomi yang dipahami sebagai jawaban untuk memenuhi keberlangsungan hidup ternyata banyak diinterpretasikan sebagai pencarian untung semata (profit motif) dan penimbunan harta sebanyak-banyaknya serta extravaganza dalam mempergunakan otoritas ekonomi sehingga memunculkan sistem yang tidak seimbang.

Maka di sinilah kejujuran dan keadilan perlu dijaga, sebab acapkali situasi ini menimbulkan ketidakadilan dimana para penumpuk harta tidak lagi mempertimbangkan norma-norma dan kemanusiaan, mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang tamak dan merusak bumi. Dalam ekonomi seringkali pola tersebut muncul, terutama dengan sistem ekonomi liberal kapitalis yang dapat menghalalkan segala cara demi merengkuh keuntungan dunia semata. Mereka tidak mengenal siapa kawan, egosentrisme menjadi prinsip “kamu-kamu, saya-saya,” menjadi ucapan manis yang setiap hari keluar dari mulutnya. Salah satu dari contoh tersebut dalam dunia bisnis adalah “**monopoli**” yang berciri *monopolistic rent* atau dalam istilah Islamnya disinyalir merupakan persamaan *al-Ihtikar*.

1. Monopoli dan Ihtikar

Istilah monopoli dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang disinyalir “hampir mirip” dengan monopoli yaitu *al-Ihtikar*. *al-Ihtikar* merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun.⁹ Dalam kajian fikih *al-Ihtikar* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.¹⁰

Adapun *al-Ikhtikar* secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya.¹¹ Dalam mendefinisikan *ikhtikar* ini terdapat beragam pendapat ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami pada obyek yang ditimbun yaitu: kelompok pertama mendefinisikan *al-Ikhtikar* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) dan kelompok yang kedua mendefinisikan *al-Ikhtikar* secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.

Kelompok ulama yang mendefinisikan *al-Ikhtikar* terbatas pada makanan pokok antara lain adalah Imam al-Gazali (ahli fikih mazhab asy-Syafi'i) dimana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud *al-Ikhtikar*

⁹W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. ke-1, h. 307.

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994), Cet. ke-1 h. 307.

¹¹Yusuf Qasim, *At-Ta'mil at-Tijariyyi fi Mijan asy-Syari'ah*, (Kairo: Dar an-Nahdhoh al-'Arabiyyah, 1986), Cet. ke-1, h. 75.

hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja. Adapun selain bahan makanan pokok atau penunjang bahan makanan seperti, obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian, kunyit dan lain sebagainya tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan. Menurut mereka masalah *ikhtikar* adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash.¹²

Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan *al-Ikhtikar* lebih luas dan umum diantaranya adalah imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi). Beliau menyatakan bahwa larangan *ikhtikar* ini tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Pendapat ini juga diikuti oleh ulama kontemporer Dr. Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*. Menurut mereka, yang menjadi 'ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *ihhtikar* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.¹³

¹²Yusuf al-Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Alih bahasa oleh: Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. ke-5, h. 190

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), Cet. ke-1, h. 655

As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah menyatakan *al-Ihtikar* sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnnya harga barang tersebut.¹⁴

Fathi ad-Duraini pula mendefinisikan *ikhtikar* dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara rakyat, negara, ataupun hewan (peternakan) amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. *Al-Ikhtikar* menurut ad-Duraini, tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan syarat, embargo yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa memuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain. Misalnya, pedagang gula pasir di awal Ramadhan tidak mau menjual barang dagangannya, karena mengetahui bahwa pada minggu terakhir bulan Ramadhan masyarakat sangat membutuhkan gula untuk menghadapi lebaran. Dengan menipisnya stok gula di pasar, harga gula pasti akan naik. Ketika itulah para pedagang gula menjual gulanya,

¹⁴As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), Cet. 1, h. 162

sehingga pedagang tersebut mendapat keuntungan (profit) yang berlipat ganda.¹⁵

Adiwarman Karim mengatakan bahwa *al-Ikhtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopolys rent*.¹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan monopoli dalam istilah ekonomi adalah hak menguasai secara tunggal perdagangan dimana pihak lain tidak boleh ikut campur, sehingga monopolis (pemegang hak monopoli) dapat melakukan produksi dan penawaran harga sekehendaknya.¹⁷ Monopoli juga merupakan suatu bentuk pasar dimana hanya ada satu firma saja dan firma tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat.¹⁸ Pemegang hak monopoli memiliki hak untuk memproduksi barang-barang usahanya sesuai dengan kehendaknya, sehingga di saat tertentu bisa saja stok yang ada dalam perusahaan ditahan dan tidak dipasarkan dengan maksud untuk menaikkan harga dan meningkatnya permintaan dari konsumen, sehingga akan meningkatkan kelangkaan suatu barang.

Dari terminologi-terminologi di atas dapat dipahami bahwa *al-Ikhtikar* dalam dataran konseptual berbeda dengan monopoli, namun jika

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, h. 655

¹⁶ AdiwarmanAzwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2000), Cet. ke-1, h. 154.

¹⁷ M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), Cet. ke-1, h. 482.

¹⁸ Sadono Sakirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001), Cet. ke-1, h. 261.

dilihat dari dataran faktualnya memiliki banyak persamaan, sedangkan perbedaannya adalah sangat tipis sekali. Adapun persamaannya adalah:

- a. Monopoli dan *al-ikhtikar* sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak (motivasi yang kuat) dalam mempermainkan harga (*price maker*);
- b. Pelaku monopoli dan *al-ikhtikar* sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasaran atau tidak;
- c. Monopoli dan *Ikhtikar* dapat mengakibatkan polemik dan ketidakpuasan pada masyarakat.
- d. Monopoli dan *ihhtikar* merupakan salah satu cara golongan orang kaya untuk mengeksploitasi (*zulm*) golongan miskin.

Sedangkan diantara perbedaan monopoli dan *ikhtikar* adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan *Ikhtikar* tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar namun masyarakat menengah dengan modal alakadarnya pun bisa melakukannya;
- b. Suatu perusahaan monopolis cenderung dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah (adanya regulasi standard pemerintah), sedangkan *ikhtikar* dimana dan kapan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.

- c. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam *ikhtikar* kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang tentatif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.
- d. Praktek monopoli adalah legal dan bahkan di negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan suatu negara, sedangkan ihtikar merupakan aktifitas ekonomi yang ilegal.

2. Dasar Hukum

Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan Allah untuk memilikinya, maka halal pula dijadikan sebagai obyek perdangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan hukum Islam bahwa barang itu pada dasarnya halal, akan tetapi karena sikap serta perbuatan para pelakunya yang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram. Dalam al-Qur'an secara langsung tidak ada disebutkan mengenai al-Ikhtikar (*monopolistic rent*). Tetapi ada ayat yang menyebutkan mengenai penimbunan emas dan perak, yaitu:





Artinya : *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”* (QS. at-Taubah [9] : 34).

Walaupun tidak ditemukan secara jelas dalam al-Qur'an tentang *al-Ikhtikar* (Monopoli) tetapi ia mempunyai hubungan dengan riba. Dalam riba terdapat unsur *zulmun* (menganiaya) orang lain diakibatkan karena ketidakmampuan peminjam untuk membayarkan utangnya tepat waktu maka secara otomatis harga menjadi naik melebihi pokok pinjamannya dan hal ini memberatkan yang mengakibatkan sipeminjam teraniaya dan secara terpaksa harus membayarkan tambahan modal tersebut. Sementara *ikhtikar* walaupun secara implisit, juga menagandung *zulmun* (menzhalimi) dan masyarakat akan merasakan akibat fatalnya. Sebab *al-Ikhtikar* bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, dengan menimbun barang yang beredar di pasaran dapat mengakibatkan kelangkaan dan tentunya akan terjadi kenaikan harga secara otomatis di atas normal. Sehingga masyarakat yang biasanya tidak kekurangan barang dan dapat membelinya sesuai kehendaknya tanpa merasakan kesulitan, namun karena akibat ihtikar tersebut mereka jadi kekurangan barang dan sulit untuk menjangkau harga agar dapat memnuhi kebutuhan mereka, namun karena sudah terdesak akan kebutuhan pokok dan hidup sehari-hari barang yang langka tersebut

akhirnya dibeli juga walaupun terpaksa. Pada kasus ini terdapat unsur menganiaya dan memaksa bagi si pelaku Ikhtikar dan teraniaya serta keterpaksaan bagi masyarakat walaupun ia tidak berlaku secara eksplisit.

Firman Allah:



Artinya : "...Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. al-Baqarah [2] :).

Dalam hadits Nabi SAW juga telah dijelaskan tentang larangan praktek monopoli ini, diantaranya adalah hadits berikut,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya : Dari Sa'id bin Musayyab meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa.'" (HR. Muslim).

Larangan dalam hadis tersebut, menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan, menjauhi dan menghindari. Sementara cercaan atau predikat bagi orang yang melakukan penimbunan dengan sebutan *khâti`* berarti orang yang berdosa dan berbuat maksiat merupakan suatu indikasi yang menunjukkan bahwa tuntutan untuk meninggalkan tersebut bermakna tegas (keras). Orang yang berbuat maksiat dengan sengaja berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran syara' dan

mengingkari ajaran syara' merupakan perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian perbuatan *al-Ikhtikar* termasuk perbuatan yang diharamkan.

Para ulama terkemuka abad pertengahan pun, seperti Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, dan Ibn Khaldun, telah pula melakukan kajian yang mendalam tentang praktik monopoli. Ibn Taimiyyah misalnya, dalam kitabnya *al-Hisbah fil Islam* menyatakan bahwa ajaran Islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama.

Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan di tangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi.

Negara bertanggung jawab penuh untuk menciptakan keadilan ekonomi, dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Karena itulah, beliau menekankan pentingnya keberadaan lembaga *al-Hishbah* sebagai organ negara yang bertugas untuk memonitor pasar, mengawasi kondisi perekonomian dan sekaligus mengambil tindakan jika terjadi ketidakseimbangan pasar akibat monopoli dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *at-Turuk al-Hukmiyyah*.

Sementara itu, Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* juga menyatakan pentingnya peran negara dalam menciptakan keadilan ekonomi dan keseimbangan pasar. Ia menegaskan bahwa pajak (dan juga denda) adalah instrumen yang dapat digunakan oleh negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus untuk mengeliminasi praktik-praktik kecurangan yang terjadi di pasar, termasuk praktik-praktik monopoli yang dilakukan oleh segelintir pebisnis.

BAB IV

MONOPOLI HARGA DALAM JUAL BELI BUAH PIANG DI DESA TANJUNG BELIT KECAMATAN SIAK KECIL KABUPATEN BENGKALIS

A. Monopoli Harga dalam Jual Beli Buah Pinang di Desa Tanjung Belit

Di desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis telah lama melakukan transaksi jual beli buah pinang. Adapun yang menentukan harga dalam jual beli ini adalah seorang pembeli buah pinang yang disebut dengan toke. Jika dilihat pada jual beli yang lain (selain jual beli buah pinang) yang menentukan harga adalah seorang penjual. Namun karena yang menentukan harga dalam jual beli buah pinang tersebut adalah toke. Toke yang ada di kampung tersebut hanya satu sehingga dia semena-mena terhadap penetapan harga pinang, dalam ekonomi hal ini dikenal dengan monopoli, dampak dari monopoli tersebut adalah tidak adanya *transparansi* harga antara harga pinang dengan petani dan harga di pasaran. Di samping itu toke melakukan potongan persen terhadap setiap penimbangan buah pinang. Potongan persen dilakukan terhadap buah pinang yang sudah kering maupun masih basah (belum kering).

Memang tidak seluruh masyarakat desa Tanjung Belit yang bertani pinang. Hanya sebagian dari mereka saja yang bertani pinang. Ini dilakukan sebagai penopang atau untuk menopang hidup yang masih serba kekurangan.

Mereka menanam pinang di kebun yang ditanam di antara tanaman lain seperti karet ataupun kelapa. Dan sebagian lain mereka tanam di perkarangan rumah.

Pinang yang di dapat harus dikumpulkan terlebih dahulu agar yang dihasilkan menjadi banyak. Setiap pinang yang masak akan di ambil,lalu buah pinang tersebut dipisahkan dari kulitnya. Di ambil isinya saja, dan kemudian dijemur. Setelah menghasilkan banyak pinang, pinangpun bisa di jual untuk mendapatkan uang. Dalam menjemur pinang, sangat membutuhkan cuaca yang panas. Dan apabila sedang musim penghujan, para petani harus menunggu lama untuk mengeringkan pinang. Apabila pinang tersebut masih basah, harganya menjadi murah.

Setelah semua pinang terkumpul, pinangpun di jual. Setelah pinang di bawa kepada toke dan pinang sudah di masukkan ke dalam karung, pinang pun ditimbang. Dari penimbangan tersebut terjadi pemotongan berat. Setiap 5 kg pinang di potong berat timbangan sebanyak 0,5 kg. Dengan kata lain harga pun menjadi berkurang. Hal ini dilakukan toke karena toke khawatir akan mengalami kerugian. Karena pinang yang dikumpul belum tahu kering atau tidak seluruhnya. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Sutino seorang petani buah pinang mengatakan harga yang ditetapkan atau dipatok oleh toke tidak sesuai dengan usaha mereka mengumpulkan pinang. Pada saat itu toke mematok harga setiap kg nya hanya Rp. 3500.¹ Sedangkan pada saat itu harga pinang dipasaran berkisar Rp. 6500 – Rp. 7000.

¹Sutino, (Petani Pinang), *Wawancara*, Tanjung Belit, 12 Juni 2012

Tentu saja dengan ulah toke seperti itu, membuat masyarakat menjadi rugi. Padahal mereka butuh proses lama untuk menjual pinang. Dari menunggu pinang yang masak lalu mengumpulnya dan memisahkan biji dan kulitnya. Dan mengeringkan pinang tersebut. Ruginya tidak saja pada hasil atau uang yang didapat namun dari segi waktu dan tenaga juga banyak terbuang.

Kasus yang penulis temui di lapangan, saat Karim mengumpulkan pinang dan pinang siap di jual. Pinang yang terkumpul sebanyak 50 kg. sedangkan yang dibayar oleh toke adalah sebanyak 45 kg. Sedangkan yang 5 kg lagi tidak dihitung (dianggap hangus). Padahal Karim banyak membutuhkan tenaga dalam mengumpulkan pinang. Dia harus membawa pinang dari kebunnya yang berjarak 5 km menuju rumahnya untuk dikupas dan dikeringkan.²

Kasus lain yang penulis temukan, yaitu saat Parno menjual pinangnya kepada toke. Pinang yang ditimbang sebanyak 60 kg namun yang dibayar toke adalah sebanyak 6 kg lagi tidak dihitung (dianggap hangus). Padahal ia harus mengumpulkan pinangnya dari kebunnya yang berjarak 3 km dengan menggunakan sepeda. Karena Parno tidak mempunyai sepeda motor.

Setelah semua pinang ditimbang oleh toke, pinang pun dikumpulkan oleh toke di gudang dekat rumahnya. Saat wawancara dengan toke (Priyono) mengatakan: pinang yang sudah dibeli itu akan cepat menjamur, sehingga

²Parno, (Petani Pinang), *wawancara*, Tanjung Belit, 12 Juni 2012

saat dijual ke agen besarnya beratnya menjadi berkurang. Karena pinang yang berjamur harus di pisahkan atau tidak ikut ditimbang.³

Penulis merasa aneh dengan jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis melenceng dari tujuan awal si toke yang menganggap pinang tersebut cepat menjamur kalau dibiarkan lama. Padahal pinang tersebut disimpan digudang yang tidak terkena air hujan dan terhindar dari jamur.

Dari tindakan toke tersebut jelaslah itu suatu praktek monopoli. Yang mana ia menguasai seluruh perdagangan pinang di Desa Tanjung Belit. Dari menentukan harga pinang sampai menentukan timbangan.

Jadi penulis berkeimpulan bahwasannya pembeli pinang atau toke yang berada di Desa Tanjung Beli Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mendapatkan untung dua kali lipat. Pertama, si toke mendapatkan untung dari harga yang dimanipulasi olehnya. Kedua, si toke mendapatkan untung dari hasil potongan persen yang dilakukan setiap penimbangan.

Memang kalau dilihat dari komoditi yang diperjualkan, tidaklah begitu besar hasilnya. Di sini perlu penulis sampaikan beberapa manfaat pinang. Pinang mempunyai manfaat sperti perekat, pewarna tekstil (merah), sebagai obat jantung, dan sebagai campuran untuk obat penguat gigi.

Di Indonesia memang belum ada pabrik pinang yang bersifat industry besar melainkan hanya industry rumahan yang berskala kecil. Kota-kota yang menjadi komoditi buah pinang terbesar di Indonesia adalah Jambi dan Aceh.

³Priyono, (Toke Pinang), *Wawancara*, Tanjung Belit, 15 Juni 2012

Buah pinang yang dihasilkan oleh para petani Indonesia kebanyakan diekspor ke luar negeri. Tujuan ekspor mereka adalah Malaysia, Thailand, India.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli harga Buah Pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya monopoli harga dalam jual beli buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang mereka alami akan kita lihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Adapun jumlah sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V
Daftar Jenis Kelamin Responden di Desa Tanjung Belit

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1	Laki-laki	68 orang	85%
2	Perempuan	12 orang	15%
Jumlah		80 orang	100%

Begitu pulalah kegiatan yang terjadi di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis hampir setiap hari mereka lakukan tanpa mereka ketahui sebenarnya pengertian muamalah itu sendiri adalah kegiatan yang berhubungan antara sesama manusia.

Saat ditanya apakah jual beli itu termasuk dari bagian muamalah, ada yang menjawab termasuk dan ada yang menjawab tidak tahu bahkan ada yang menjawab tidak termasuk. Hal ini dapat diketahui dari tabel di bawah ini:

Tabel VI
Tanggapan Responden Mengenai Jual Beli Termasuk Kegiatan
Muamalah

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
A	Termasuk	40 orang	50 %
B	Tidak Termasuk	-	-
C	Tidak Tahu	40 orang	50%
Jumlah		80 orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menjawab jual beli itu termasuk bagian dari muamalah adalah 40 orang (50 %), yang menjawab tidak termasuk 0 (0 %), dan yang menjawab tidak tahu 40 orang (50 %).

Responden yang mengatakan tidak tahu itu adalah responden yang berumur rata-rata 40 tahun ke atas, mereka beralasan bahwa mereka tidak tahu dan responden yang menjawab tidak termasuk sebenarnya karena tidak tahu juga. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwasannya responden kurang mendapatkan pendidikan agama Islam.

Tabel VII
Tanggapan Responden Tentang Sering/Tidak Melakukan Jual Beli

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
A	Sering	70 orang	91,7%
B	Tidak Pernah	-	-
C	Jarang	10 orang	8,3%
Jumlah		80 orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat kita ketahui bahwasannya yang menjawab sering melakukan jual beli sebanyak 70 orang (91,7%), yang tidak menjawab tidak pernah melakukan jual beli kosong (0%), dan yang menjawab jarang melakukan jual beli sebanyak 10 orang (9,9%).

Saat ditanyakan tentang monopoli atau kekuasaan dalam menentukan harga adalah berdosa atau dilarang. Jawaban responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel VIII
Tanggapan Responden Mengenai Monopoli Harga atau Kekuasaan dalam Menetapkan Harga

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
A	Dilarang	80 orang	100%
B	Dibenarkan	-	-
C	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		80 orang	100%

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasannya yang mengatakan dilarang adalah 80 orang (100%) artinya semua responden mengatakan

dilarang. Dengan demikian dapat disimpulkanbahwasannya semua responden sepakat menjawab dilarang kalau monopoli harga atau kekuasaan dalam menetapkan harga itu dilarang.

Tabel IX
Tanggapan Responden Mengenai Potongan Timbangan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
A	Dibolehkan	-	-
B	Tidak dibolehkan	80 orang	100%
C	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		80 orang	100%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa yang menjawab dibolehkan adalah 0 orang (0%), yang menjawab tidak dibolehkan adalah 80 orang (100%), dan yang menjawab tidak tahu adalah 0 orang (0%).

Tabel X
Sikap responden jika Toke mengurangi Timbangan Buah Pinang

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
A	Menegurnya	80 orang	100%
B	Diam Saja	-	-
C	Pura-pura Tidak Tahu	-	-
Jumlah		80 orang	100%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwasannya yang menjawab menegurnya adalah 80 orang (100%), yang menjawab diam saja adalah 0 orang (0%), sedangkan yang menjawab tidak tahu adalah 0 orang (0%).

Tabel XI
Tanggapan Responden Mengenai Sesuai/Tidak Jual Beli Buah Pinang
Yang Dilaksanakan Sesuai Syari'at Islam

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
A	Sudah Sesuai	20 orang	25%
B	Belum Sesuai	60 orang	75%
C	Tidak Tahu	-	-
Jumlah		80 orang	100%

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasannya yang menjawab sudah sesuai adalah 20 orang (25%), yang menjawab belum sesuai 60 orang (75%), dan yang menjawab tidak tahu adalah 0 (0%).

Hasil wawancara dengan Basirah (penjual buah pinang) mengatakan belum sesuai karena dalam jual beli tersebut ia merasa ada keterpaksaan karena sistem potong persen yang terlalu banyak potongannya. Potongan yang diambil setiap 1 kg maka dipotong 1/5 kg. Jika Basirah menjual buah pinang sebanyak 50 kg maka akan dipotong 5 kg, Basirah mengatakan potongan tersebut terlalu banyak.⁴

⁴Basirah, (Petani Pinang), *Wawancara*, Tanjung Belit, 16 Juni 2012

Namun saat ditanyakan apakah merasa terpaksa karena berat timbangan sewaktu menjual buah pinang dikurangi, ada yang menjawab terpaksa dan ada juga yang menjawab tidak. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel XII
Tanggapan Responden tentang Terpaksa/Tidak Ukuran Timbangan
Dipotong

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
A	Terpaksa	42 orang	52,5%
B	Tidak terpaksa	22 orang	27,5%
C	Ragu-ragu	16 orang	20%
Jumlah		80 orang	100%

Dari table di atas dapat dilihat bahwasannya yang menjawab terpaksa adalah 42 orang (52,5%), yang menjawab tidak terpaksa adalah 22 orang (27,5%), dan yang menjawab ragu-ragu adalah sebanyak 16 orang (20%).

Saat wawancara dengan Bukhari (penjual pinang) beliau mengatakan terpaksa karena berat ukuran timbangan buah pinangnya dikurangi. Bukhari merasa terpaksa karena jumlah yang dipotong itu terlalu banyak (dalam 10 kg dipotong 1/5 kg). Bukhari juga mengatakan jika buah pinang yang dijualnya seberat 50 kg maka yang akan dipotong adalah sebanyak 2,5 kg, hal itu yang membuat Bukhari merasa terpaksa.⁵

⁵Bukhari, (Petani Pinang), wawancara, Tanjung Belit, 17 Juni 2012

Hasil wawancara dengan Suyono menjawab ragu-ragu terhadap berat ukuran timbangan yang dikurangi saat menimbang buah pinang, beliau mengatakan ragu-ragu dengan potongan tersebut karena buah pinang akan rusak atau berjamur apabila dalam kondisi lembab atau tersimpan lama.⁶

Saat wawancara dengan Sarimah, beliau mengatakan tidak merasa terpaksa dengan pemotongan timbangan tersebut, karena pinang sangat sensitif terhadap suhu udara. Dan tidak bias disimpan terlalu lama. Dan hal ini sudah berlangsung lama. Beliau juga mengatakan bahwasannya beliau pasrah saja dengan keadaan yang terjadi. Saat ditanyakan berapa banyak pinang yang akan berjamur, Sarimah tidak mengetahui secara persis yang akan mengalami kerusakan.⁷

Saat ditanyakan dari mana responden mengetahui tentang harga pinang. Mereka menjawab dari toke dan adapula yang menjawab dari sesama penjual pinang. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel XIII
Tanggapan Responden Tentang Informasi Harga Buah Pinang

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
A	Dari Pabrik	-	-
B	Dari toke	70 orang	91,7%
C	Sesama penjual pinang	10 orang	8,3%
Jumlah		80 orang	100%

⁶Suyono, *wawancara*, Tanjung Belit, 17 Maret 2012

⁷Sarimah, *wawancara*, Tanjung Belit, 17 Maret 2012

Tabel di atas menunjukkan responden yang menjawab dari pabrik adalah kosong (0%), dari toko adalah 70 orang (91,7%), sedangkan dari sesama penjual buah pinang adalah 10 orang (8,3%).

Dan saat ditanyakan apakah harga buah pinang yang ditentukan oleh toko sudah sesuai, ada yang menjawab sudah dan adapula yang menjawab belum. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel XIV
Tanggapan Responden Tentang Sesuai/Belum Harga Buah Pinang
Dengan Harga Pasaran

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
A	Sudah	20 orang	25%
B	Belum	50 orang	62,5%
C	Ragu-ragu	10 orang	12,5%
Jumlah		80 orang	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwasannya yang menjawab sudah adalah 20 orang (25%) yang menjawab belum 50 orang (62,5%) sedangkan yang menjawab ragu-ragu 10 orang.

Hasil wawancara dengan Misran. Beliau mengatakan harga buah pinang yang ditentukan oleh toko sudah sesuai.⁸ Namun Reno mengatakan belum sesuai, alasan Reno mengatakan belum sesuai karena potongan timbangan yang dilakukan terlalu banyak. Kemudian harga yang ditetapkan oleh toko terlalu murah dan masyarakat yang menjual pinang tidak mengetahui harga sebenarnya. Karena sumber informasi yang terbatas. Beliau juga mengatakan

⁸Misran, wawancara, Tanjung belit, 17 Maret 2012

bahwasannya toke sudah mengambil keuntungan 2 kali lipat. Yang pertama dari hasil potongan timbangan yang dilakukan kemudian dari harga yang telah toke tetapkan, apakah sesuai dengan standar harga dari pabrik.⁹

Tabel XV
Tanggapan Responden Tentang Turun Naiknya Harga Buah Pinang
Di Pasaran

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
A	Tahu	-	-
B	Tidak Tahu	80 orang	100%
C	Ragu-ragu	-	-
Jumlah		80 orang	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwasannya yang menjawab Tahu adalah 0 orang(0%) yang menjawab Tidak tahu adalah 80 orang (100%) sedangkan yang menjawab ragu-ragu 0 orang (0%).

Ditambahkan lagi factor sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah karena keterbatasan masyarakat terutama petani pinang yang ada di desa tersebut dengan informasi yang mereka peroleh. Hal ini disebabkan juga karena lokasi desa mereka yang terisolir ataupun jauh dari pusat kota.

Oleh karena itulah toke yang ada di desa tersebut mempunyai kesempatan ataupun memanfaatkan peluang emas untuk mengeruk

⁹Reno, wawancara, Tanjung belit 17 Maret 2012

keuntungan yang berlipat ganda. Dengan cara memanipulasi harga buah pinang yaitu menurunkan harga buah pinang dengan harga yang sebenarnya.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Monopoli Harga Dalam Jual Beli Buah Pinang

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman, artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat diakomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syara'. Terlebih lagi saat sekarang ini perkembangan semakin pesat sehingga hal itu mengakibatkan tuntutan bagi Hukum Islam untuk menentukan kejelasan status hukumnya karena terkadang permasalahan yang terjadi tidak secara terperinci dijelaskan.

Namun demikian bukan berarti Hukum Islam tidak mampu menjawab setiap permasalahan yang muncul, agama Islam ingin umatnya menggunakan akal yang diberikan oleh Allah SWT untuk dapat menganalisis setiap perubahan dan perkembangan yang mereka hadapi.

Pada bagian yang sebelumnya sudah dipaparkan bahwa jual beli buah pinang yang terjadi di Desa Tanjung belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dimana yang menentukan harga buah pinang adalah Toke, dan karena Toke dikampung itu satu-satunya. Mau tidak mau hanya kepadanya mereka (penjual) menjual buah pinangnya, dan di dalam prakteknya terjadi manipulasi harga yang tidak ada transparansi harga buah pinang di pasaran dengan harga buah pinang penjual dan juga adanya sistem potong persen

dalam ukuran timbangan dan menyebabkan harga menjadi berkurang. Di dalam hal ini jelas adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh toko terhadap jual beli buah pinang yang dilakukan.

Dari uraian di atas, berikut penulis akan menganalisa kajian tersebut dari sudut Fiqh Muamalah tentang permasalahan praktek monopoli dalam jual beli buah pinang yang terjadi di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Jual beli merupakan jenis dari mu'amalah yang di atur dalam Hukum Islam ataupun Fiqh Muamalah. Semua kegiatan yang tidak bertentangan dengan syari'at pada dasarnya dibolehkan, hal tersebut sesuai dengan kaedah di bawah ini:

الأصل الأشياء الإباحة حتى يدلل على التحريم

Artinya : *"Hukum asal sesuatu adalah boleh sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya."*¹⁰

Kegiatan muamalah atau jual beli yang terjadi di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis bertentangan dengan Hukum Islam sebab kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli tidak merasa saling ridha tapi penjual merasa terpaksa dengan jual beli tersebut, bukan seperti yang dimaksud dalam firman Allah SWT yang berbunyi:



¹⁰Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta PT. Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, h. 161

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*. (QS. an-Nisa: 29).

Adapun syarat sah jual beli yang ditentukan dalam kitab fiqh, salah satunya adalah adanya penjual dan pembeli. Kalau dilihat pada praktek jual beli di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mencukupi rukun yakni adanya penjual dan pembeli, penjual dan pembeli sudah berakal dan dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, sudah dewasa. Namun pada prakteknya pada jual beli tersebut ada rasa keterpaksaan dari pihak penjual. Dari 40 responden yang penulis teliti penjual yang merasa terpaksa berjumlah 21 orang, penjual yang merasa tidak terpaksa berjumlah 11 orang sedangkan yang merasa ragu-ragu berjumlah 8 orang. Walaupun responden merasa terpaksa akan tetapi buah pinang dijual juga, hal itu disebabkan karena toke yang ada di desa tersebut hanya satu satunya.

Dalam hal tersebut di atas, hukum Islam ingin memberikan suatu kepastian hukum yang dapat dijadikan acuan dan penyelesaian dalam permasalahan tersebut.

Islam tidak pernah membatasi setiap kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umatnya asal saja hal tersebut tetap dalam konsep *‘an taradhin min kum* artinya suka sama suka diantara kamu dan di samping itu

pula tidak bertentangan dengan konsep muamalah yang ditentukan dalam hukum Islam.

Dalam pandangan fiqh muamalah tindakan jual beli yang dilakukan oleh pembeli buah pinang yang lebih tepatnya adalah toke dilarang oleh sebab apa? Karen hukum Islam menginginkan segala sesuatu itu berjalan dengan baik dan bermanfaat, tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa terpaksa seperti konsep mumalah yang mengatakan ‘an taradhin min kum (suka sama suka diantara kamu).

Jual beli yang dilakukan di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis di larang dalam Islam, selain bertentangan dengan Firman Allah Swt surat An-nisa ayat 29 di atas juga bertentangan dengan Fiqh Muamalah yang menjelaskan jual beli tersebut dilarang karena mengandung unsur monopoli dan ahli akad tentang poin ke empat yaitu jual beli terpaksa. Hal tersebut juga dijelaskan oleh ulama Syafi’iyah dan Hanbilah yang mengatakan jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhoan ketika akad.

Dengan demikian dibutuhkan peninjauan kembali atau dengan kata lain memberikan penjelasan kepada penjual dan pembeli buah pinang untuk melakukan muamalah dengan baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak merasa terpaksa, artinya mereka saling ridho.

Terhadap permasalahan di atas jelaslah bahwa dalam hukum Islam tidak membolehkan mumalah khususnya jual beli yang mengandung unsur monopoli yang menyebabkan adanya keterpaksaan tersebut akan melanggar

prinsip muamalah yang mengatakan '*an taradhim min kum* (suka sama suka diantara kamu) yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Jual beli yang diadakan di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang mana toke di desa tersebut hanya satu yang menentukan harga, hal tersebut mengakibatkan *monopoli* yaitu toke semena-mena dalam menentukan harga buah pinang.

Dalam buku karanga Dr. Yusuf Qardawi yang berjudul norma dan etika Ekonomi Islam mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuka hati.¹¹

¹¹Dr. Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, Cet. ke-5, h. 257

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bagian terdahulu dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam jual beli buah pinang yang terjadi di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis banyak sekali unsur penipuan yang dilakukan oleh Toke.

Yaitu adanya unsur monopoli dalam transaksi jual beli buah pinang tersebut.

Unsur monopoli tersebut adalah:

- a. *Pertama*, adanya manipulasi harga yang dilakukan oleh toke tersebut. Hal ini disebabkan karena toke yang ada di Desa Tanjung Belit hanya satu-satunya. Manipulasi harga yang terjadi disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang harga buah pinang sebenarnya. Mereka hanya mendapatkan informasi dari toke yang bersangkutan dan sesama penjual buah pinang itu sendiri.
- b. *Kedua*, adanya penimbunan yang dilakukan oleh toke. Penimbunan dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan yang

berlipatganda dari penjualan buah pinang.

Sehingga hal tersebut dikatakan riba.

- c. *Ketiga*, adanya potongan persen yang dilakukan oleh toke terhadap timbangan buah pinang. Hal itu dilakukan dengan alasan karena buah pinang sangat mudah rusak atau berjamur.
2. Berdasarkan prinsip keridhaan, kejujuran serta keadilan dalam jual beli, maka jual beli yang dilakukan oleh toke buah pinang di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis tersebut adalah bagian dari jual beli yang terlarang karena adanya pihak yang dirugikan (masyarakat).
3. Kemudian penulis juga simpulkan bahwa faktor terjadinya praktek monopoli di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis adalah karena kurangnya informasi yang masyarakat peroleh terutama para petanipinang. Dan hal itu juga disebabkan karena lokasi desa mereka yang terisolir dan jauh dari pusat kota.

B. Saran

1. Para penjual dan pembeli yaitu Toke dalam penelitian ini hendaknya mengetahui dan mempelajari benar aturan dalam berdagang ataupun jual beli yang telah diajarkan agama Islam. Dan yang sudah tahu seharusnya melaksanakan sesuai dengan yang diajarkan agama

Islam. Sehingga transaksi jual beli yang dilakukan mendapat ridhahan pahala dari Allah SWT.

2. Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam transaksi jual beli buah pinang dan supaya praktek monopoli di Desa Tanjung Belit tidak terjadi lagi. Diharapkan ada tindakan tegas dari pemerintah dan dalam hal ini adalah pemerintah melalui perangkat desa. Dan perlunya pengawasan yang ketat terhadap etikadalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996, Cet. 1
- Alex, MA, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, Surabaya: Karya Harapan, 2005, Cet. 1
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994, Cet. 1
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, 1981, Cet. 1
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2000, Cet. 1
- _____, *Bank Islam*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004, Edisi Ke-23.
- A.Zainudin, dkk, *Al-Islam 2 Mu'amalah dan Akhlak*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet ke -2
- Depag RI, *Terjemahan al-Qur'an al-karim*, Jakarta: 2000 Cet ke-11
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2000, Cet.1
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2007, Cet. 1
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terjemahan Abu Usamah Fakhtur Rahman, Jakarta: Pustaka Azam, 2007, cetakan ke-2
- Imam Subhan, *Siasat Gerakan Kota dan Jalan Untuk Masyarakat Baru*, Yogyakarta: Labda, 2003, Cet. 2
- Khuzaimah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, Cet. 1
- Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Cet. 1

- M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994, Cet. 1
- Mohd, Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1978, Cet.1
- Sadono Sakirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001, Cet.1
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Terjemahan Nor Hasanuddin, Lebak Bulus: Pena Pundi Aksara: 2006, Cet.1
- Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press, 2008. Cetakan ke-1
- Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, Suska Press, Pekanbaru, 2008
- Syekh Yusuf Qardawi, *Terjemahan Halal dan Haram*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003, edisi revisi
- Sri Adiningsih, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPEF, 1999, Cet.1
- UU RI No. Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994. Cet.1
- Yusuf Qasim, *At-Ta'mil at-Tijariyyi fi Mijan asy-Syari'ah*, Kairo: Dar an-Nahdhoh al-'Arabiyyah, 1986, Cet. 1
- Yusuf al-Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Alih bahasa oleh: Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. Ke 5, Jakarta: Gema Insani, 2006.